

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius bagi semua negara di dunia, terutama di negara-negara berkembang dan sedang berkembang, contohnya di negara Indonesia yang merupakan negara berkembang. Sejak negara ini merdeka, kemiskinan menjadi masalah paling utama di Indonesia. Masalah kemiskinan yang begitu kompleks dan berkaitan dengan banyak aspek, yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, dan aspek lainnya. Seperti diketahui sampai sekarang kemiskinan di Indonesia sangat sulit diatasi. Oleh karena itu perlu penanganan yang sangat serius dari pemerintah, karena kemiskinan membuat banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang rumit dan juga kompleks serta bersifat multidimensional. Oleh karena itu pengatasan kemiskinan pun harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Istilah kemiskinan adalah ketika seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan atau kemakmuran ekonomi sesuai dengan standar hidup di suatu wilayah tertentu karena tidak mendapat pekerjaan yang cukup layak.

Pembangunan nasional harus mampu meningkatkan kinerja perekonomian agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk menampung para penduduk miskin agar mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu. Semakin besar jumlah persentase penduduk miskin di suatu daerah akan menjadi

beban pembangunan. Suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil jika jumlah persetase penduduk miskin dapat diminimalisir.

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum di Indonesia dari tahun 2015-2019 dapat dilihat dari Tabel 1.1 di bawah ini. Tabel 1.1 dapat menjelaskan kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2015 sebesar 28.592.79 orang dibanding tahun 2019 sebesar 24.790.000 orang penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu peningkatan rata-rata upah buruh per hari dengan rata-rata upah nominal buruh tani per harinya naik dan adanya penurunan harga eceran beberapa komoditas pokok (beras, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras dan ikan gembung).

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Di Indonesia Tahun 2000-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pengangguran Terbuka(%)	Indeks Pembangunan Manusia	Upah Minimum (Rupiah)
2000	38.740.550	4,90	6,08	60,7	216.500

2001	37.878.930	3,64	8,10	62,5	290.500
2002	38.392.400	4,50	9,06	65,8	362.700
2003	37.341.121	4,78	9,67	66,1	414.700
2004	36.150.221	4,03	9,86	68,7	458.500
2005	35.109.700	5,69	11,24	69,6	507.697
2006	39.307.530	5,50	10,28	70,1	602.702
2007	37.171.650	6,35	9,11	70,6	672.480
2008	34.961.525	6,01	8,39	71,17	745.709
2009	32.531.156	4,63	7,87	71,76	841.530
2010	31.022.550	6,22	7,14	66,53	908.824
2011	30.018.930	6,49	7,48	67,09	988.824
2012	29.132.400	6,26	6,13	67,7	1.088.903
2013	28.066.600	5,73	6,17	68,31	1.296.908
2014	28.280.010	5,01	5,94	68,9	1.584.391
2015	28.592.790	4,88	6,18	69,55	1.790.342
2016	28.005.390	5,03	5,61	70,18	1.997.819
2017	27.771.220	5,07	5,5	70,81	2.079.324

2018	25.949.800	5,17	5,34	71,39	2.264.679
2019	24.790.000	5,02	5,28	71,92	2.400.000

Sumber: *Badan Pusat Statistik, Indonesia Dalam Angka, Seri Publikasi Indeks Pembangunan manusia, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*

Menurut Sukirno, 2006 Proses menggambarkan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis, output per kapita mengaitkan aspek *output* total (GDP) dan aspek jumlah penduduk, sehingga jangka panjang menunjukkan intern perekonomian (*self generating*). Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara sederhana sebagai kenaikan output total (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk dan apakah diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak.

Menurut Zakaria (2009 : 104) menyatakan bahwa:

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat.

Demikian juga pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,88% sedangkan ditahun 2019 sebesar 5,02 % hal ini dipengaruhi oleh anjloknya konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat yang masih sangat rentan

terhadap kenaikan harga pangan, pada saat harga pangan naik tidak dapat mengangkat daya beli produsen atau petani.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran akan menimbulkan masalah baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Seperti penurunan produktivitas, daya beli masyarakat dan pendapatan pemerintah dari sektor pajak, kriminalitas akan meningkat, menurunnya kualitas kesehatan dan yang paling fatal dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi maupun politik. Pengangguran juga menjadi beban ekonomi negara, pengangguran berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dapat dilihat pada diatas diketahui juga pengangguran terbuka mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 2019, yang dimana pada tahun 2015 pengangguran terbuka sebesar 6,18% dibanding tahun 2019 sebesar 5,28% hal ini dikarenakan terealisasikan beberapa program-program pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sehingga kondisi ketenagakerjaan sudah membaik dalam kata lain yaitu pra kerja.

Menurut UNDP dalam Sagala (2017 : 16) menyatakan bahwa :

Pembangunan manusia adalah suatu proses perluasan pilihan bagi penduduk untuk membangun hidupnya yang di anggap berharga. Beberapa hal esensial dalam pembangunan manusia adalah agar manusia dapat merasakan kehidupan yang panjang dan sehat, berpengetahuan, dan mempunyai akses terhadap sumber-sumber yang di perlukan untuk kehidupan yang layak.

Dapat kita lihat juga pada diatas indeks pembangunan manusia dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan, yang dimana jumlah IPM 2019 sebesar 69,55 Dibanding tahun 2019 yaitu sebesar 71,92 hal ini dipengaruhi karena ternyata berbagai program kesehatan pemerintah selama ini telah memberikan hasil nyata. Yaitu, meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, ketersediaan dan penyebaran obat, sumber daya kesehatan di daerah, serta meningkatnyaangka harapan hidup dan akses rumah tangga terhadap sanitasi yang bersih. Kenaikan IPM secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa pendapatan mengalami kenaikan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan alokasi belanja rumah tangga untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan, terutama pada rumah tangga miskin.

Menurut Widodo dalam Winarti (2011 : 2) bahwa :

Mengemukakan bahwa pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju bukan saja di hitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakat. Hal ini sejalan dengan paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*human centered develovment*). Secara konsep, pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, yang mana secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar adalah upaya meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan.

Menurut Waldman dan Whalen dalam Sungkar (2015 : 40) mengemukakan bahwa upah minimum merupakan kebijakan yang bermanfaat untuk memastikan pekerja mendapat upah yang wajar sekaligus mencegah kemiskinan di kalangan pekerja yang mencakup pemenuhan standart kebutuhan hidup buruh. Lebih jauh, pendistribusian kembali penghasilan pekerja pada skala gaji terendah

menurunkan dispersi upah dan kemungkinan akan meningkatkan permintaan agregat melalui efek multiplier. Dibanyak negara upah minimum adalah hal utama dalam penetapan upah nasional. Mereka tidak hanya menyediakan batasan upah secara umum, tetapi juga mempengaruhi upah, menaikkan tingkat pendapatan dan memiliki dampak penting pada depresi upah keseluruhan. Mereka yang bekerja di sektor formal adalah target kebijakan upah minimum. Mereka tidak menerima upah di bawah kebijakakan upah minimum karena peraturan tersebut. Ini menjadi suatu keharusan bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan jika tidak akan dikenakan denda. Oleh karena itu, upah minimum tidak hanya alat untuk melindungi pekerja di bagian bawah skala upah tetapi sering menjadi isu kelas menengah.

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas upah minimum dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan, yang dimana pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.790.342 sementara tahun 2019 sebesar Rp. 2.400.000 kenaikan upah minimum ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu biaya hidup yang tinggi juga melahirkan tuntutan pekerja atas upah yang lebih tinggi, undang-undang ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah pengupahan melarang perusahaan membayar upah karyawan lebih rendah dari upah minimum (UMP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan perusahaan berskala besar atau punya reputasi bagus tentu bisa memberikan kompesasi yang besar bagi karyawannya, seperti gaji, berbagai tunjangan kesejahteraan dan fasilitas.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2000-2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2000-2019?
2. Bagaimanakah pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2000-2019?
3. Bagaimanakah pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2000-2019?
4. Bagaimanakah pengaruh upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2000-2019.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini disertai dengan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2000-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2000-2019.

3. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2000-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2000-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis, yakni dapat memberikan sumbangan teori, minimal menguji teori-teori ekonomi yang berkaitan dengan pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, pengangguran terbuka, upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.
2. Kegunaan praktis yaitu manfaat yang dapat diperoleh melalui temuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan ekonomi makro. Pemerintah mendapatkan informasi yang memadai dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia.
 - b. Bagi penduduk miskin, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan untuk keluar dari masalah kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan hidup mereka, terutama jika kemiskinan itu bersumber dari mereka sendiri.
 - c. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan menerapkan ilmu-ilmu yang didapat selama mengikuti pelajaran di kampus Universitas HKBP Nommensen.

- d. Bagi mahasiswa dan pembaca, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau masukan bagi peneliti lain yang mempunyai permasalahan yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kemiskinan

2.1.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah fenomena yang seringkali dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Kemiskinan juga seringkali dipandang sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi.

United Nations Development Program (UNDP) dalam Palenewen (2018 : 54) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian “tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik” sebagai salah satu indikator kemiskinan. Menurut Cahyat dalam Panelewen (2018 : 54) juga menyatakan bahwa di penghujung abad 20 muncul pengertian terbaru mengenai kemiskinan yaitu bahwa kemiskinan juga mencakup dimensi kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi (*voicelessness*). Jadi kemiskinan berwajah majemuk atau bersifat multidimensi.

Menurut Purnamawati dan Yuniarta (2021 : 105) menyatakan bahwa:

Kemiskinan dibedakan menjadi tiga pengertian yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relative dan kemiskinan kultural.

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan ini dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan demikian maka kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makan,

pakaian, dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yaitu pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan.

2. Kemiskinan relatif

Kemiskinan ini dapat dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

2.1.2. Ukuran Kemiskinan

Semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan pada norma tertentu. Pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi.

Menurut Kuncoro dalam Saitian (2014 : 4) garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi (*consumption-based poverty line*) terdiri dari dua elemen, yaitu :

1. Pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya.
2. Jumlah kebutuhan yang lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Badan pusat statistik (BPS) mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan diukur dari sisi

pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

2.1.3 Garis Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan Makanan (GKM) adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain).

Garis kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi di perkotaan dan jenis komoditi di pedesaan. Rumus perhitungan garis kemiskinan (BPS) adalah:

$$\mathbf{GK} = \mathbf{GKM} + \mathbf{GKNM}$$

Keterangan:

GK = garis kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

BPS (Badan Pusat Statistik) menggunakan batas garis kemiskinan setara dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari yang akan disetarakan dengan rupiah.

Selanjutnya, 2.100 kilo kalori perkapita perhari akan disetarakan dengan rupiah ketika pengukuran kemiskinan dilakukan di tiap daerah/provinsi dengan menyesuaikan harga yang berlaku pada suatu daerah/provinsi tertentu. Pengukuran kemiskinan pada daerah/provinsi akan menggunakan suatu rupiah dengan menyesuaikan harga pada tiap-tiap daerah tertentu. Misalnya, pada bulan maret 2021 jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 1.113,76 ribu orang atau 12,84 persen dari total penduduk. Dibandingkan dengan kondisi September 2020 jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 5,89 ribu orang dari 1.119,65 ribu orang atau turun 0,14 persen.

2.1.4 Teknik Perhitungan GKM (Garis Kemiskinan Makanan)

1. Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*refence population*) yaitu 20% penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasarkan GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang rill dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari.

Rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan adalah:

Keterangan :

GKM_j = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilo kalori)

P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j

Q_{jk} = rata-rata kuatitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j

V_{jk} = nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j

h_j, j = daerah (perkotaan atau pedesaan).

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2.100 kilo kalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$\overline{HK}_j = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jk}}$$

Keterangan : kalori dari komoditi k di daerah j, HK_j = harga rata-rata kalori di daerah j:

$$F_j = \overline{HK}_j \times 2100$$

Keterangan : kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kalori/kapita/hari.

2.1.5 Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (GK) dengan rumus perhitungan :

$$P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$$

Keterangan : $\alpha = 0$, z = garis kemiskinan, y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...q), y_i < z, q

= banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, n = jumlah penduduk.

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan memang tidak mudah untuk mengukurnya. Ada dua macam ukuran kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

a. Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan . perkiraan kebutuhan dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup layak. Menurut Purba, Tobing dan Ester (2012 : 74) bahwa “ kemiskinan absolut adalah suatu konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan tetapi pada ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimum agar bisa bertahan hidup.”

Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

b. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif adalah suatu konsep yang mengacu pada garis kemiskinan (*poverty line*) yang sebenarnya merupakan suatu ukuran mengenai ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Kondisi ini disebabkan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan.

Ada beberapa tolak ukur yang dikembangkan untuk mengukur kemiskinan masyarakat yakni,

- 1) Setara dengan beras,
- 2) Kebutuhan fisik minimum (KFM)
- 3) Ukuran kemiskinan relatif,
- 4) Badan Pusat Statistik tolak ukur dari Bank Dunia

Tabel 2.1 dibawah ini menunjukkan batas kemiskinan kota dan desa.

Tabel 2.1 Batas Kemiskinan Kota dan Desa di Indonesia

Batas Kemiskinan	Kota (kg)	Desa (kg)
Miskin	480-600	320-480
Sangat Miskin	360-480	240-360
Melarat (Paling miskin)	270-360	180-300

Sumber : Siahaan dan Purba, 2003.

Garis kemiskinan yang dihasilkan ada yang bersifat global tetapi ada juga membedakan antar daerah, seperti antara daerah pedesaan dengan perkotaan.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.2.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2015 : 9) “Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang

dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah”. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh apabila jumlah produksi barang dan jasa dalam perekonomian tersebut mengalami peningkatan dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Produksi total barang dan jasa selama satu tahun tertentu disebut namanya output nasional atau pendapatan nasional atau disebut dengan istilah Produk Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses kenaikan output nasional atau pendapatan nasional periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Secara nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan cara membandingkan PDB riil satu tahun yang sedang berjalan dengan PDB riil satu tahun sebelumnya, dinyatakan dalam persen. Demikian juga secara regional, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan cara membandingkan PDRB riil satu tahun berjalan dengan PDRB riil satu tahun sebelumnya dinyatakan dalam persen.

Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan. Output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Menurut Case & Fair dalam Girsang (2004 : 26) pertumbuhan ekonomi terjadi bila (1) masyarakat mendapatkan lebih banyak sumberdaya, atau (2) masyarakat menemukan cara penggunaan sumberdaya yang tersedia secara lebih efisien.

2.2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan teori pembangunan sejak pertama kali dikemukakan oleh Adam Smith dan mengalami puncak kejayaannya dengan lahirnya teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh para ahli. Berikut ini akan diuraikan beberapa teori pertumbuhan ekonomi.

a. Pertumbuhan Adam Smith

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang berurutan, yaitu dimulai dari masa perburuan, masa berternak, masa bercocok tanam, perdagangan, dan tahap perindustrian. Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antarpelaku ekonomi. Dalam hal ini Adam Smith adanya memandang pekerja sebagai salah satu input (masukan) merupakan titik sentral pembahasan bagi proses produksi. Pembagian kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori Adam Smith, dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Spesialisasi yang dilakukan oleh tiap-tiap pelaku ekonomi tidak lepas dari faktor-faktor pendorong yaitu :

1. Peningkatan keterampilan kerja,
2. Penemuan mesin-mesin yang menghemat tenaga.

Spesialisasi akan terjadi jika tahap pembangunan ekonomi telah menuju ke sistem perekonomian modern yang kapitalistik. Meningkatnya kompleksitas aktivitas ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat, mengharuskan masyarakat untuk tidak lagi melakukan semua pekerjaan secara mandiri, namun lebih

ditekankan pada spesialisasi untuk menggeluti bidang tertentu.

b. Teori Pembangunan Karl Marx

Karl Marx dalam bukunya “Das Kapital” membagi evolusi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yaitu dari feodalisme, kapitalisme, dan kemudian yang terakhir adalah sosialisme. Evolusi perkembangan masyarakat ini akan sejalan dengan proses pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat feodalisme mencerminkan kondisi dimana perekonomian yang masih bersifat tradisional. Dalam tahap ini tuan tanah merupakan pelaku ekonomi yang memiliki tawar menawar tertinggi relatif terhadap pelaku ekonomi lain. Perkembangan teknologi yang ada menyebabkan terjadinya pergeseran disektor ekonomi, dimana masyarakat yang semula agraris-feodal kemudian mulai beralih menjadi masyarakat industri yang kapitalis.

Seperti halnya masa feodal, pada masa kapitalisme ini para pengusaha merupakan pihak yang memiliki tingkat posisi tawar menawar tertinggi relatif terhadap pihak lain khususnya kaum buruh. Marx menyesuaikan asumsinya terhadap cara pandang ekonomi klasik ketika itu dengan memandang buruh tidak memiliki tawar menawar sama sekali terhadap para majikannya, yang merupakan kaum kapitalis. Konsekuensi logis penggunaan asumsi dasar tersebut adalah kemungkinan terjadinya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan para pengusaha terhadap buruh.

2.2.3 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, beberapa alat ukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu :

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) atau di tingkat regional PDRB, merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu perekonomian dalam satu tahun yang dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang global sifatnya, dan bukan merupakan alat ukur ekonomi yang tepat, karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan produk yang sesungguhnya, padahal sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan.

b. Produk Domestik Bruto Per Kapita/Pendapatan Per Kapita

Produk Domestik Bruto per kapita atau Produk Regional Bruto (PDRB) per kapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih cepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara dari pada nilai PDB atau PDRB saja. Produk domestik bruto per kapita baik tingkat nasional maupun daerah adalah jumlah PDB nasional maupun PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di negara maupun di daerah yang bersangkutan, atau dapat disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata

2.3 Pengangguran

2.3.1 Definisi Pengangguran

Menurut Sukirno (2015 : 13) bahwa :

Pengangguran sering digunakan sebagai istilah untuk menyatakan orang yang tidak bekerja sama sekali. Pengertian ini kurang tepat karena tidak semua orang tidak bekerja disebut sebagai penganggur. Beberapa kelompok masyarakat

seperti para ibu rumah tangga dengan alasan harus mengasuh anak dan harus mengurus keluarga, anak-anak muda harus sekolah atau kuliah dahulu, dan anak-anak orang kaya yang sudah memiliki kekayaan yang lebih dari cukup atau kemungkinan gajinya lebih kecil dari yang diharapkan biasanya tidak mau atau tidak sedang mencari pekerjaan. Oleh karena itu, kendatipun mereka tidak bekerja namun tidak disebut sebagai penganggur.

Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi seiring mengkalim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan.

2.3.2 Jenis Pengangguran

Macam-macam pengangguran dan faktor penyebab pengangguran adalah sebagai berikut (Desi, 2017: 59-62) :

1. Pengangguran Tersembunyi

Keadaan dimana suatu kegiatan jenis ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan.

2. Pengangguran Musiman

Keadaan penganggur pada masa-masa tertentu dalam satu tahun. Pengangguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian. Petani akan menganggur pada masa tanam dan jeda antara musim tanam dan musim panen.

3. Setengah menganggur

Keadaan seseorang bekerja di bawah jam kerja normal. Menurut Badan Pusat

Statistik (BPS), di Indonesia jam normal adalah 35 jam seminggu. Jadi pekerja yang kerja di bawah 35 jam seminggu termasuk golongan setengah menganggur.

4. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih rendah daripada pertumbuhan tenaga kerja, akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum bekerja.

Faktor penyebab pengangguran menurut Sukirno (2004 : 55) adalah :

- 1) Jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan kerja tidak seimbang.
- 2) Kemajuan teknologi.
- 3) Keterampilan dan pengalaman pemohon tidak sesuai kriteria.
- 4) Kurangnya pendidikan.
- 5) Kemiskinan.
- 6) PHK.
- 7) Kesulitan mencari lowongan kerja.

2.3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut BPS, tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, yang dikutip dengan rumus:

$$TPT = \frac{\text{jumlah penduduk menganggur}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan

tenaga kerja (labour supply) yang terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap. Pada pasar kerja. Misalnya TPT=6%, artinya dari 100 penduduk di usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan pengangguran.

2.4 Indeks Pembangunan Manusia

UNDP (United Nations Development Programme) dalam Irmayanti (2017 : 38) memberikan pengertian bahwa:

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya di analisis serta dapat dipahami dari sudut manusia bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan (*formation*) kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan sekaligus sebagai pemanfaatan (*utilization*) kemampuan/keterampilan mereka. Sebagaimana laporan yang dikeluarkan UNDP (United Nations Development Programme), ada beberapa konsep penting mengenai pembangunan manusia yaitu sebagai berikut :

- a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian,
- b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata,
- c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya

- meningkatkan kemampuan atau kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal,
- d. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan,
 - e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup.

2.5 Upah Minimum

Menurut Waldman dalam Sari, Nazamuddin, dan Nasir (2015 : 40), bahwa:

Upah minimum merupakan kebijakan yang bermanfaat untuk memastikan pekerja mendapatkan upah yang wajar sekaligus mencegah kemiskinan dikalangan pekerja yang mencakup standart kebutuhan hidup buruh. Lebih jauh, pendistribusian kembali penghasilan pekerja pada skala gaji terendah menurunkan dispersi upah dan kemungkinan akan meningkatkan permintaan agregat melalui efek multipiler.

Di banyak negara upah minimum adalah hal yang utama dalam penetapan upah nasional. Mereka tidak hanya menyediakan batasan upah secara umum, tetapi juga mempengaruhi upah, menaikkan tingkat pendapatan dan memiliki dampak penting pada dispersi upah keseluruhan (Sungkar 2015 : 12). Mereka

yang bekerja di sektor formal adalah target kebijakan upah minimum. Mereka tidak menerima upah di bawah upah minimum karena peraturan tersebut. Ini menjadi suatu keharusan bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan jika tidak akan dikenakan denda. Oleh karena itu, upah minimum tidak hanya alat untuk melindungi pekerjaan di bagian bawah skala upah tetapi sering menjadi isu-isu kelas menengah.

2.6 Hubungan Variabel-Variabel Penelitian

2.6.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Menurut Siregar dalam Siregar dan Wahyunarti (2006 : 27) bahwa: pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Karena dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menurunkan jumlah kemiskinan yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupan nya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (*growth with equity*). Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan pemerintahan yang cukup efektif meredistribusi manfaat pertumbuhan yang boleh jadi didapatkan dari sektor modern seperti jasa dan manufaktur yang padat modal. Ketika perekonomian berkembang disuatu kawasan atau daerah, terdapat lebih

banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusi dengan baik diantara penduduk kawasan tersebut maka akan mengurangi kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang positif di Indonesia memberikan dampak yang bagus terhadap perekonomian yang nantinya dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus meningkat disetiap tahun nya di suatu wilayah atau daerah akan meningkatkan kapasitas perekonomian, yang nantinya akan menciptakan lapangan kerja baru dan peningkatan produktivitas tenaga kerja sehingga pendapatan akan meningkat dan mengurangi resiko seseorang terjatuh dalam kemiskinan.

2.6.2 Pengaruh Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena, penambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja menimbulkan pengangguran yang tinggi. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama dalam jangka pendek yang selalu dihadapi setiap negara. Karena itu, setiap perekonomian dan negara pasti menghadapi masalah pengangguran yaitu pengangguran alamiah (*natural rate of unemployment*).

Hubungan pengangguran dan kemiskinan sangat erat sekali, jika suatu masyarakat sudah bekerja pasti masyarakat atau orang tersebut berkecukupan atau kesejahterannya tinggi, namun di dalam masyarakat ada juga yang belum bekerja

atau menganggur, pengangguran secara otomatis juga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Sukirno dalam Lutfi, Wibisono, dan Yulianti (2016 : 4) menyatakan bahwa :

Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan kemiskinan. Apabila pengangguran disuatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangun ekonomi dalam jangka panjang.

2.6.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari tiga penyusun yang pertama ialah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemajuan kesehatan suatu wilayah. Penyusun IPM yang kedua adalah Angka Melek Huruf (AMH), merupakan indikator pendidikan suatu daerah, yang ketiga adalah Paritas Daya Beli antar wilayah. Paritas Daya Beli Merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk melakukan perbandingan harga-harga riil antar wilayah. Menurunnya kemiskinan saat IPM meningkat merupakan indikasi bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia akan berakibat pada meningkatnya produktifitas kerja penduduk yang akan meningkatkan perolehan pendapatan. Dengan pendapatan yang meningkat akan menyebabkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya serta dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan pendapat

Menurut Napitupulu dalam Patta (2012 : 43) bahwa :

Indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Indeks Pembangunan Manusia memiliki indikator komposit dalam penghitungannya antara lain angka harapan hidup, angka melek huruf,

dan konsumsi per kapita. Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan per kapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah.

2.6.4 Pengaruh Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Kenaikan dalam daya beli tenaga kerja berasal dari akumulasi modal dan kemajuan teknologi. Biasanya upah tak bergantung pada seberapa banyak uang yang dicetak oleh Bank Sentral. Jika inflasi naik, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat, hal ini disebabkan karena harga barang akan naik. Peningkatan inflasi yang lebih tinggi diharapkan bisa diimbangi oleh kenaikan upah.

Menurut Fitriani (2016 : 22) bahwa:

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan memuat tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut :

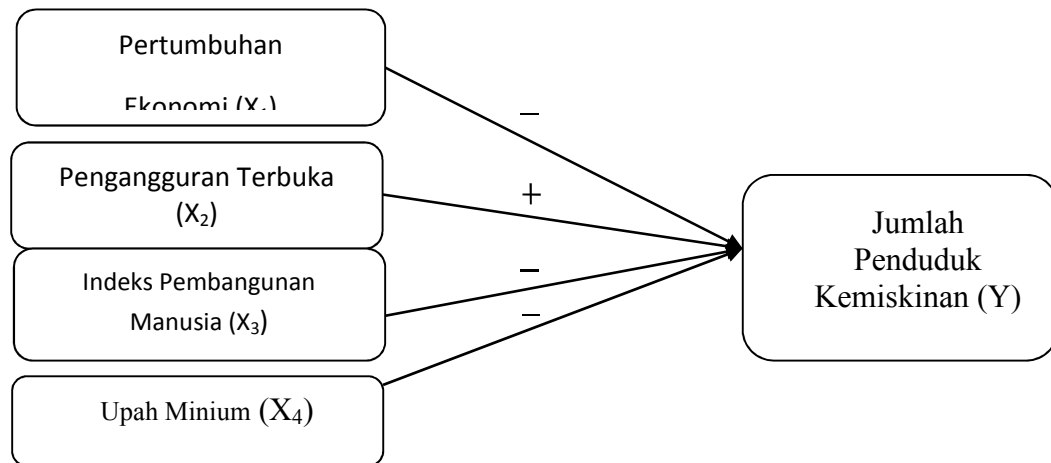
1. Penelitian yang dilakukan oleh Seri Jefry Adil Waruwu (2016) dengan judul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995 – 2014. Penelitian ini menggunakan metode, OLS data panel. Hasil Penelitian:

- 1) **Variabel Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan Terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2014.**
 - 2) **Variabel Pengangguran mempunyai pengaruh positif dan signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2014.**
 - 3) **Variabel Belanja Pemerintah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2014.**
 - 4) **Variabel Investasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2014.**
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sayifullah dan Tia Ratu Gandasari (2016: 250-251) dengan judul Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode OLS. Hasil Penelitian:
- 1) **Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2008-2012.**
 - 2) **Variabel Pengangguran berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2008-2012.**
3. Penelitian yang dilakukan oleh Matcher Halomoan Samosir (2019) dengan judul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan Investasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2000-2017. Penelitian ini menggunakan metode OLS. Hasil penelitian:
- 1) **Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia Tahun 2000-2018.**
 - 2) **Pengangguran memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia Tahun 2000-2018.**
 - 3) **Belanja Pemerintah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia Tahun 2000-2018**
 - 4) **Investasi memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia Tahun 2000-2018.**
 - 5) **Berdasarkan Uji F, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah dan investasi secara bersama-sama (simultan)**

mempengaruhi signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia Tahun 2000-2018.

2.8 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Berdasarkan penelitian terdahulu uraian teoritis, hubungan variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang ada dimana kebenarannya masih perlu dikaji dan diteliti melalui data yang terkumpul. Pada dasarnya hipotesis merupakan suatu pernyataan tentang hakikat dan hubungan antara variabel – variabel yang dapat diuji secara empiris. Berdasarkan

latar belakang dan kajian pustaka yang sudah dijelaskan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.
2. Pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.
3. Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.
4. Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah di Indonesia, dengan menganalisis pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, upah minimum dan jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak dihimpun secara langsung. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), BAPPENAS dan yang dikumpulkan adalah data pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, upah minimum dan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Jenis data adalah data *time series* (runtun waktu) tahun 2000-2019.

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Model Ekonometrik

Untuk mengetahui pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, indeks pembangunan ekonomi, upah minimum, jumlah penduduk miskin di Indonesia maka akan dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah teknik analisis yang akan menjelaskan hubungan variabel-variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan model regresi linier berganda.

3.3.2 Pendugaan Model Ekonometrik

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis statistik berupa regresi linier berganda. Model persamaannya regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_1 + \hat{\beta}_2 X_2 + \hat{\beta}_3 X_3 + \hat{\beta}_4 X_4 + \varepsilon_i$$

$$i = 1, 2, 3, \dots, n,$$

Dimana :

Y = jumlah penduduk miskin (juta jiwa)

α = Intersep

$\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3, \hat{\beta}_4$ = Koefisien regresi (Statistik)

X_1 = Pertumbuhan ekonomi (%)

X_2 = Pengangguran terbuka (%)

X_3 = Indeks Pembangunan Manusia

X_4 = Upah minimum (Rupiah)

ε_i = Galat (*Error Term*)

3.3.3 Pengujian Hipotesis

3.3.3.1 Uji Secara Individu (Uji-t)

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel terikat maka dilakukan pengujian dengan uji-t dengan taraf nyata $\alpha = 5\%$.

1. Pertumbuhan Ekonomi (X1)

$H_0 : \beta_1 = 0$ artinya, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.

$H_1 : \beta_1 < 0$ artinya, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{S(\hat{\beta}_1)}$$

$\hat{\beta}_1$: koefisien regresi

β_1 : parameter

$S(\hat{\beta}_1)$: simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (X2)

$H_0 : \beta_2 = 0$ artinya, pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia tahun 2000-2019.

$H_1 : \beta_2 > 0$ artinya, pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_2 - \beta_2}{S(\hat{\beta}_2)}$$

$\hat{\beta}_2$: koefisien regresi

β_2 : parameter

$S(\hat{\beta}_2)$: simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya tingkat pengangguran terbuka secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.

3. Indeks Pembangunan Manusia (X3)

$H_0 : \hat{\beta}_3 = 0$ artinya, indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.

$H_1 : \beta_3 < 0$ artinya, indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_3 - \beta_3}{S(\hat{\beta}_3)}$$

$\hat{\beta}_3$: koefisien regresi

β_3 : parameter

$S(\hat{\beta}_3)$: simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya indeks pembangunan manusia secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.

4. Upah Minimum (X4)

$H_0 : \hat{\beta}_4 = 0$ artinya, upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.

$H_1 : \beta_4 < 0$ Artinya, upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_4 - \beta_4}{S(\hat{\beta}_4)}$$

$\hat{\beta}_4$: koefisien regresi

β_4 : parameter

$S(\hat{\beta}_3)$: simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya upah minimum di Indonesia secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.

Koefisien regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *probability* dengan taraf signifikannya. Apabila nilai *probability* $< \alpha$ maka koefisien variabel tersebut signifikan mempengaruhi variabel terikat dan sebaliknya. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat keyakinan 95% atau $\alpha = 5\%$ dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika nilai *probability* t-statistik $< 0,05\%$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Jika nilai *probability* t-statistik $> 0,05\%$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

3.3.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui proporsi variabel terikat yang dijelaskan variabel bebas secara serempak. Tujuan uji F ini adalah untuk menguji apakah variabel-variabel bebas yang diambil mempengaruhi variabel terikat secara bersama-sama atau tidak.

Adapun langkah-langkah pengujian uji F sebagai berikut :

- a. Membuat hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) sebagai berikut :

H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ berarti variabel bebas secara serempak/keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

H_1 : β_i tidak semua nol, $i = 1, 2, 3, 4$, berarti variabel bebas secara serempak/keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat.

- b. Mencari nilai F hitung ada nilai kritis F statistik dari tabel F. Nilai kritis F berdasarkan α dan df untuk numerator (k-1) dan df untuk denominator (n-k).

Rumus untuk mencari F_{hitung} adalah :

$$F_{hitung} = \frac{JKR(k-1)}{JKG(n-k)}$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

k : Banyaknya koefisien regresi

n : Banyaknya sampel

Uji F (uji simultan) digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji F disebut juga uji kelayakan model yang digunakan untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak berarti bahwa model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 5%.

Dasar pengambilan keputusan :

1. Jika probabilitas (signifikan) $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Jika probabilitas (signifikan) $> 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

3.3.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji kebaikan-suai bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda yang digunakan sudah sesuai menganalisis hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebas. Untuk melihat kebaikan-suai model yang digunakan koefisien determinasi R^2 untuk mengukur seberapa besar keragaman variabel tak bebas yang dapat dijelaskan oleh

keragaman variabel-variabel bebas. Nilai koefisien determinasi R^2 adalah antara 0 dan 1. Jika R^2 mendekati angka 1, maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya.

3.3.5 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

3.3.5.1 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2013: 103) "Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen". Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat (korelasi yang kuat) di antara variabel bebas. Variabel-variabel bebas yang mempunyai hubungan tidak mungkin dianalisis secara terpisah pengaruhnya terhadap variabel terikat. Pengaruhnya terhadap nilai taksiran :

- a. Nilai-nilai koefisien mencerminkan nilai yang benar.
- b. Karena galat bakunya besar maka kesimpulan tidak dapat diambil melalui uji-t.
- c. Uji-t tidak dapat dipakai untuk menguji keseluruhan hasil taksiran.
- d. Tanda yang dihadapkan pada hasil taksiran koefisien akan bertentangan dengan teori.

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinearitas adalah dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*), bila nilai $VIF < 10$ maka dianggap tidak ada pelanggaran multikolinieritas, namun bila sebaliknya $VIF > 10$ maka dianggap ada pelanggaran multikolinearitas. Untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa parah kolinearitas (korelasi) antar sesama variabel bebas maka dapat dilihat dari matriks korelasi. Bila nilai matriks $> 0,95$ maka kolinearitasnya serius (tidak dapat ditolerir). Namun bila sebaliknya nilai matriks $< 0,95$ maka kolinearitas dari sesama variabel bebas masih dapat ditolerir. Cara lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan multikolinieritas adalah dengan menggunakan cara regresi

parsial. Cara ini di peroleh dengan nilai R^2 pada regresi model utama. Jika R^2 lebih besardari pada nilai R^2 pada model utama terdapat multikolinearitas.

3.3.5.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Ada beberapa cara untuk menguji keberadaan serial autokorelasi, yaitu: Uji Durbin-Watson dilakukan dengan membandingkan DW hitung dengan DW tabel. Jika terdapat autokorelasi maka galat tidak lagi minim sehingga penduga parameter tidak lagi efisien.

Uji Durbin-Watson dirumuskan sebagai berikut:

$$dW = \frac{\sum_{t=2}^{t=n} (\hat{e}_t - \hat{e}_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^{t=n} \hat{e}_t^2}$$

Dengan jumlah sampel dan jumlah variabel tidak bebas tertentu diperoleh dari nilai kritis dl dan du dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai α . Secara umum bisa diambil patokan :

$0 < d < dL$	Menolak hipotesis 0
$dL \leq d \leq dU$	Daerah Keragu-raguan
$dU < d < 4 - dU$	Gagal Menolak Hipotesis 0
$4 - dU \leq d \leq 4 - dL$	Daerah Keragu-raguan
$4 - dL < d < 4$	Menolak Hipotesis 0

Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi dalam model yang digunakan dapat juga digunakan uji Run. Uji Run merupakan bagian dari statistika nonparametrik dapat

digunakan untuk menguji apakah antar galat terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar galat (residu atau kesalahan pengganggu) tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa galat adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Cara yang digunakan dalam uji Run adalah sebagai berikut :

H_0 : Galat (res_1) acak (random)

H_1 : Galat (res_1) tidak acak

3.3.5.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel galat atau residu memiliki sebaran normal. Penggunaan uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai galat menyebar normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk mendeteksi apakah galat menyebar normal atau tidak digunakan analisis grafik dan uji statistik.

Untuk menguji normalitas galat dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antar data pengamatan dengan sebaran yang mendekati sebaran normal. Caranya adalah dengan melihat sebaran peluang normal yang membandingkan sebaran kumulatif dari sebaran normal. Sebaran normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan diagram data galat akan dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Jika sebaran data galat atau residu normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

3.6 Definisi Operasional Variabel

1. Jumlah Penduduk Miskin (Y)

Jumlah penduduk miskin adalah penduduk Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan BPS tahun 2000-2019 dinyatakan dalam juta orang per tahun.

2. Pertumbuhan Ekonomi (X1)

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Data yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2000-2019, yang dinyatakan dalam persen per tahun.

3. Pengangguran Terbuka (X2)

Pengangguran terbuka diartikan sebagai seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Data yang digunakan adalah tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2000-2019, yang dinyatakan dalam persen per tahun.

4. IPM (X3)

Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dapat dipahami dari sudut manusia bukan hanya dari pertumbuhannya. Data yang digunakan adalah indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2000-2019.

5. Upah Minimum (X4)

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Data yang digunakan adalah rata-rata upah minimum setiap provinsi di Indonesia tahun 2000-2019, yang dinyatakan dalam rupiah per tahun .